

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Elsa Pinika Putri Purba

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : Elsapinika@gmail.com

Kusmilawaty Kusmilawaty

Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Email : kusmilawaty@uinsu.ac.id

Korespondensi penulis : Elsapinika@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the effect of clarity of budget targets, accounting control, on the accountability of government agency performance in the North Sumatra Industry, Energy Trade and Mineral Resources Department. This research uses quantitative methods with an associative approach, data collection techniques using questionnaires and the population and sample in this research are the entire office apparatus organization and heads of sections/Departments of Industry, Energy Trade and Mineral Resources of North Sumatra Province consisting of the Finance Sub-Section, Head of the Program and Planning Sub-Division, as many as 30 employees with a sampling technique using saturated sampling technique. Data were analyzed using multiple linear regression methods. The results of the partial test hypothesis show that Clarity of Budget Targets has a positive effect on the Performance Accountability of Government Agencies of the Department of Industry, Energy Trade and Mineral Resources of North Sumatra Province, while Accounting Control has no effect on the Performance Accountability of Government Agencies of the Department of Industry, Energy Trade and Mineral Resources of Sumatra Province North.*

Keywords: *Clarity of Budget Targets, Accounting Control, and Performance Accountability*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada dinas Perindustrian, perdagangan energi dan sumber daya mineral Sumatra utara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner serta populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan organisasi perangkat kantor dan kepala bagian/ Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan, sebanyak 30 pegawai dengan teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik sampling jenuh. Data dianalisis dengan metode regresi linear berganda. Hasil dari hipotesis uji parsial menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sedangkan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Akuntabilitas Kinerja

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Media pelaporan akuntabilitas tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan hasil dari suatu proses Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIP yang berkualitas sangat penting perannya karena dapat memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban dan transparansi sehingga dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah kepada para stakeholders atau pemangku kepentingan termasuk masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Herawaty (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ialah: (1) Kejelasan Sasaran Anggaran, kesesuaian antara pandangan manajemen puncak dengan pandangan manajemen lini bawah. Aktivitas yang ada dalam kesesuaian sasaran dapat salah arah bila tiap manajer mengasumsikan bahwa apa yang terbaik bagi pusat tanggung jawab adalah yang terbaik bagi perusahaan. Dengan demikian, adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan memudahkan untuk menyusun target-target anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam program perencanaan pemerintah, sehingga dapat berjalan dengan baik dan terealisasi sesuai rencana, serta aparat harus memiliki informasi yang cukup untuk memprediksi masa depan dengan tepat, (2) Pengendalian Akuntansi, semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga dan mengubah pola aktifitas organisasi. Penggunaan sistem pengendalian diharapkan mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja,

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk dari pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun yang telah disusun melalui bentuk media pelaporan. Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 Tahun 2003 tentang Penyempurnaan Pedoman Penyusunan LAKIP maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

dijadikan sebagai bentuk komitmen yang nyata oleh pemerintah dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik.

Pertanggungjawaban Pejabat publik kepada publik tentang kinerja Pemerintah selama satu tahun anggaran disebut LAKIP. Proses Kinerja Pemerintah harus diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan dari Rencana Strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing - masing , serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Gambaran penerapan prinsip -prinsip dari Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah dan diwujudkan melalui penyusunan LAKIP . Tujuan utama dari reformasi sektor publik adalah terwujudnya akuntabilitas publik. Lembaga - lembaga sektor publik untuk mengharuskan lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal karena adanya tuntutan akuntabilitas publik. Karena terdapat tuntutan yang kemudian muncul sehingga perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. (Rizki,2014).

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu dan contoh kasus maka penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: Menurut Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. (1) pengaruh positif yang signifikan kejelasan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten OKU. (2) Secara simultan ada pengaruh positif yang signifikan kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten OKU. artinya semakin baik kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, maka semakin baik akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Daerah Kabupaten OKU. Berbeda dengan Herrawaty (2011) yang meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kota Jambi. Menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh negatif, dan dilihat dari tingkat signifikansinya tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian Setiawan (2013) yang menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan, sama halnya dengan penelitian Indudewi (2009) yang menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif dan signifikan dimana pengendalian adalah proses yang dilakukan dalam manajemen organisasi untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan

secara ekonomis, efisien dan efektif. Penelitian Herawaty (2011) dan Ajarwati (2012) menunjukkan hasil yang berbeda atau sebaliknya.

Hidayattullah, A., & Herdjiono, M. V. I. (2015) Menurut hasil penelitiannya (1) Pengujian persial variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan adanya sasaran anggaran yang jelas maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan.(2) Pengujian persial variabel pengendalian akuntansi (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengujian secara simultan variabel kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan hampir semua instansi dan lembaga-lembaga pemerintah mewajibkan konsep akuntabilitas ini digunakan. Ketidakmampuan menerapkan konsep akuntabilitas secara konsisten di setiap lini pemerintahan merupakan salah satu penyebab lemahnya organisasi sehingga mengakibatkan munculnya penyimpangan pengelolaan keuangan dan administrasi negara di Indonesia. dalam menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Pemerintah masih menghadapi beberapa permasalahan. Selain itu juga, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban hasil kerja seseorang atau unit organisasi, dalam mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai, dalam rangka pencapaian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas kinerja secara periodik. Sumber daya dalam hal ini merupakan sarana pendukung yang diberikan kepada seseorang atau unit organisasi dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas yang telah dibebankan kepadanya Pusat. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP, 2007).

Menurut Maryanto (2007:1) pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah: Perwujudan kewajiban pada suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu hubungan antara pihak yang mengendalikan dengan pihak pengelola suatu entitas, dan secara formal, memiliki hak atau kekuasaan atas entitas masing-masing tersebut. Pada hakikatnya, akuntabilitas adalah kewajiban pemberian tanggung jawab kepada pihak yang memberi, untuk menjelaskan dan memberikan alasan atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan atas hasil upayanya dalam melaksanakan tugas atau pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Moehariono, 2014:99). Menurut Bastian (2010:88) akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci bagi terwujudnya good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak ada salahnya jika siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggung jawaban publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuannya.

Kejelasan Sasaran Anggaran

Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran disebut sebagai kejelasan sasaran anggaran. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah yang berakuntabilitas tidak lepas dari anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan dengan pendapat Mardiasmo (2009) yang menyatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah manfaat sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan instansi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimiliki terdapat beberapa karakteristik sistem penganggaran. (Nordiawan dan Hertianti. 2010).

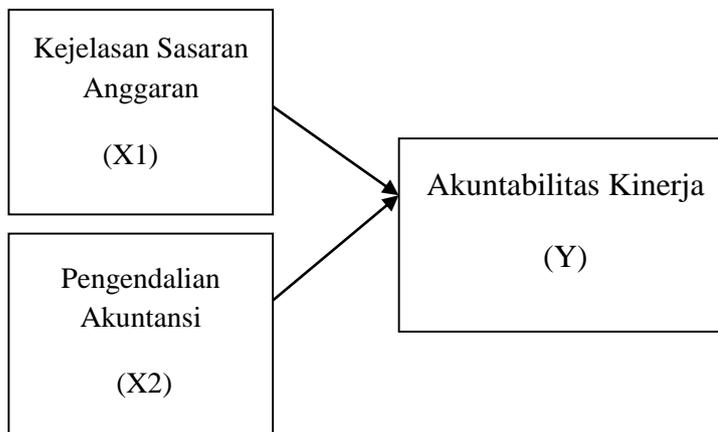
Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target - target anggaran. Selanjutnya target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi.

Pengendalian Akuntansi

Menurut definisi, pengendalian (control) mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksana. Untuk mencapai tujuan telah ditetapkan bagi organisasi, pengendalian harus dikembangkan sehingga dapat diambil keputusan yang sesuai rencana. Pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas oraganisasi. Dalam hal ini yang termasuk pegendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, system pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Pengendalian akuntansi mengasumsikan bahwa telah ditetapkan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. (Mulyadi, 2008).

Kerangka konseptual

Kerangka Pemikiran



X1 (Variabel Independen) :Kejelasan Sasaran Anggaran

X2 (Variabel Independen) :pengendalian akuntansi

Y (Variabel Dependen) :Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) penegendalian akuntansi (X2). Pemerintah harus mempunyai program prioritas yang berorientasi kepada kepentingan publik yaitu melalui kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi. Anggaran dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehingga tercapainya anggaran, tercapai pula sasaran pemerintah daerah. Pengendalian akuntansi digunakan sebagai alat dalam memantau, mengendalikan, dan penyusunan anggaran di suatu instansi pemerintahan.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Menurut Kenis (1979) dalam Munawar (2006) kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu, sasaran anggaran harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

Ketidajelasan sasaran anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja, implikasinya pada penurunan kinerja yang berarti juga penurunan akuntabilitas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

H1: kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

2. Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian ,Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera utara

Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengendalian adalah proses penetapan standar, dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Ekonomis, efisien, dan efektivitas pelayanan dari instansi pemerintah daerah kepada masyarakat, merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Menurut Carter dan William (2009) manfaat dari pengendalian akuntansi yang didalamnya adalah mengenai pengendalian biaya adalah tanggung jawab atas pengendalian biaya. Peneliti terdahulu menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Setiawan (2013) menyimpulkan bahwa pengendalian akuntansi terbukti berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja.

H2: pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah semua Organisasi Perangkat yang terdiri dari Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Program dan Perencanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Teknik sampling yang digunakan adalah Sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang digunakan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Data penelitian ini merupakan *cross section* data yaitu data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Data diperoleh dengan cara mengirimkan kuisisioner secara langsung kepada setiap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Variabel Definisi operasional merupakan suatu pernyataan yang dapat dapat memberikan makna untuk suatu istilah. Sehingga agar tidak salah dimengerti, dapat diuji, dan ditentukan dan juga dinyatakan kebenarannya oleh orang lain. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Penelitian ini Akuntabilitas kinerja sebagai variabel dependen.

Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) yang menjadi objek. Variabel independen yang digunakan penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Model regresi linier berganda adalah model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Model regresi linier berganda dapat dilakukan model yang baik jika model tersebut memenuhi asumsi normalitas data dan terbebas dari asumsi - asumsi. Pengujian hipotesis pertama tentang Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) terhadap Akuntabilitas

kinerja (Y). Kedua, tentang Pengendalian Akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y). Persamaan regresi linier berganda yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- Y : Akuntabilitas Kinerja
 α : Konstanta
 $\beta_1 \beta_2$: Koefisien Regresi Parsial
 E : Variabel Pengganggu (error)
 X1 : Kejelasan Sasaran Anggaran
 X2 : Pengendalian akuntansi

Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Menurut Kuncoro (2013:246) koefisien determinasi pada intinya digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Rumus koefisien determinan sebagai berikut (Riduwan dan Sunarto, 2007:81).

$$R = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

R = Nilai Koefisien Determinan

r = Nilai Koefisien Korelasi

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas

Adapun hasil uji validitas untuk kuesioner Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Akuntabilitas Kinerja. Memiliki nilai r-hitung yang diperoleh dari perhitungan statistik lebih besar dari nilai r-tabel, terlihat bahwa nilai koefisien korelasi setiap butir pernyataan lebih besar dari 0,361 sehingga hasil ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Akuntabilitas Kinerja layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Menurut Riduwan dan Sunarto (2007:348) reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah dianggap baik. Metode yang digunakan dalam pengujian reliabilitas ini adalah dengan menggunakan metode alpha cronbach's yang dimana satu kuesioner

dianggap reliabel apabila cronbach's alpha > 0,600 (Kuncoro, 2013:181). Dalam perhitungan uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan software SPSS 16 dan hasil sebagai berikut:

Table 1
Hasil uji reliabilitas

Variable	Koefisien alpha	Keterangan
Kejelasan sasaran anggaran	0,738	Reliabel
Pengendalian akuntansi	0,682	Reliabel
Akuntabilitas kinerja	0,739	Reliabel

Sumber : data diolah SPSS.v.26,2023

Berdasarkan hasil uji reliabilitas yang terlihat dalam table 1 dapat disimpulkan bahwa kehandalan alat ukur tinggi dan dapat dipercaya, karena memiliki nilai Cronbach alpha > 0,600 dengan demikian seluruh pernyataan pada kuesioner penelitian dapat dinyatakan reliabel.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil perhitungan regresi linear berganda dapat dilihat pada

Table 2
Hasil analisis regresi linear berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		
	B	Std.error	Beta	T	Sig.
1 (contant)	19.908	6.872		2.897	.007
Kejelasan sasaran anggaran	.640	.180	.567	3.562	.001
PengendalianAkuntansi	.024	.175	.021	.135	.894

Berdasarkan tabel 2 yakni hasil olahan data regresi dengan menggunakan program SPSS 16 maka persamaan regresinya yaitu: $Y = 19,908 + 0,640X1 + 0,024X2$ Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut di atas maka dapat diinterpretasikan bahwa:

1. Angka konstan sebesar 19.908 mempunyai nilai positif, artinya jika X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran), X2 (Pengendalian Akuntansi), sama dengan nol, maka Y (Akuntabilitas Kinerja) akan sebesar 19.908.
2. Angka koefisien regresi X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) sebesar 0,640 artinya bahwa jika X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) meningkat satu satuan, maka Y (Akuntabilitas Kinerja) mengalami kenaikan sebesar 0,640 dengan asumsi variabel X2 (Pengendalian Akuntansi) tetap.

3. Angka koefisien regresi X2 (Pengendalian Akuntansi) sebesar 0,024 artinya bahwa jika X2 (Pengendalian Akuntansi) meningkat satu satuan, maka Y (Akuntabilitas Kinerja) mengalami kenaikan sebesar 0,024 dengan asumsi variabel X1 (Kejelasan Sasaran Anggaran) tetap

Pengujian Hipotesis Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk menunjukkan pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) secara individual atau parsial terhadap variabel terikat (dependen). Jika t -hitung $>$ t -tabel dan nilai sig. $T < \alpha = 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial atau individual variabel bebas (independen) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t -tabel = $(\alpha/2; n-k-1)$ hasilnya $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dan $30-3-1 = 26$, maka $(0,025; 26) = 2,055$ dimana n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel bebas. Maka hasil yang diperoleh untuk t -tabel dengan signifikansi uji dua sisi (0,025) dan derajat kebebasan ($df=n-k-1$) adalah 2,055. Pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel.

Model	Unstandardized coefficients		Standardized coefficients		
	B	Std.error	Beta	T	Sig.
1 (constant)	19.908	6.872		2.897	.007
Kejelasan sasaran anggaran	.640	.180	.567	3.562	.001
Pengendalian Akuntansi	.024	.175	.021	.135	.894

- a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel di atas maka diperoleh:

1. Nilai t hitung variabel kejelasan sasaran anggaran (X1) sebesar 3,562 dengan t tabel sebesar 2,055, karena t hitung $>$ t tabel, yaitu $3,562 > 2,055$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh kejelasan sasaran anggaran (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Y) secara parsial.
2. Nilai t hitung variabel pengendalian akuntansi (X2) sebesar 0,135 dengan t tabel sebesar 2,055 karena t hitung $<$ t tabel, yaitu $0,135 < 2,055$, maka H_2 ditolak dan H_0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan pengendalian akuntansi (X2) terhadap Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara (Y).

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.275	2.10287

Predictors: (Constant), KSA, PA

Dependent Variable: akuntabilitas kinerja

Sumber kusioner diolah SPSS.v.26,2023

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa nilai *R Square* 0.325. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Pengendalian Akuntansi (X2) mampu menerangkan atau menjelaskan variabel dependen yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 32,5% sisanya 67,5% dijelaskan oleh variabel di luar lain tidak dimasukkan dalam model penelitian model regresi ini karna $100\% - 32,5\% = 67,5\%$.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa ada pengaruh yang signifikan kejelasan sasaran anggaran (X1) terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan . Hal ini disebabkan karena sasaran anggaran Dinas Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan lebih menekankan kepada kemampuan kinerja dalam menyerap anggaran, namun belum bisa mengefisiensikan penggunaan dana anggaran yang dibelanjakan, sehingga belum menghasilkan keluaran yang maksimal.

Hasil analisis data juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan pengendalian akuntansi (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instasi Pemerintah Dinas Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan . Hal ini disebabkan karena tanggung jawab kinerja tidak selamanya ada hubungan dengan pengendalian akuntansi. Karena pengendalian akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua metode yang berkaitan dengan data akuntansi, dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta kekayaan dan keandalan catatan keuangan. Didalam LAKIP pengendalian akuntansi hanya sebagai proses pelaporan bukan faktor utama dalam tanggung jawab kinerja instansi pemerintah Dinas Perindustrian,Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan.

Hasil koefisien determinasi adjusted R square sebesar 32,5%, artinya kontribusi pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja sebesar 32,5%, sedangkan sisanya sebesar 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial ada pengaruh positif yang signifikan kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan. Artinya semakin baik kejelasan anggaran, maka semakin baik akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan.
2. Sedangkan variabel pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Dalam membuat perencanaan anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan agar lebih meningkatkan sistem pelaporan agar akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan lebih baik lagi.
2. Dalam implementasi atau pelaksanaan anggaran Pemerintah Dinas Perindustrian, Perdagangan Energi dan Sumber Daya Mineral Sumatera Utara Medan sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/ kegiatan dengan menerapkan pengendalian akuntansi yang ketat seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan daerah dalam hal pencatatan penggunaan anggaran dan pelaporannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan sebaiknya menambahkan variable penelitian diluar dari variabel yang telah diteliti agar dapat mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini serta menambahkan referensi lebih banyak lagi dan memperluas objek penelitian seperti pada sektor pemerintahan yang lainnya dan sektor swasta.

DAFTAR PUSTAKA

- Gani, A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Ekonomika*, 13(2), 104-116.
- Setiawan, E. (2014). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (Doctoral dissertation, Riau University).
- Precelina, D. D., & Wuryani, E. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 7(3), 1-10.
- Hidayattullah, A., & Herdjiono, M. V. I. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD di Merauke.
- Fauzan, R. H., Nasir, A., & Silalahi, S. P. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Penerapan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip)(Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Provin (Doctoral dissertation, Riau University)
- Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 429-444
- Lesmana, D., & Maimunah, M. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Kinerja Manajerial sebagai Variabel Moderasi pada Instansi Pemerintah Kota Palembang. *Buletin Ekonomi*, 12(1), 37-48.
- Septiyani, A. (2010). PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (STUDI EMPIRIS PADA P (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rahmawati, A., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerinta:(Studi Pada SKPD di Kota Bandung Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi: Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen*, 7(14), 58-67.
- Herawaty, Netty. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Universitas Jambi*. Vol. 6 No. 2, 151-161. ISSN 1979-4851.

- Anjarwati, Mei. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. ISSN 2252-6765.
- Cefrida S., M., Emrinaldi Nur DP, dan Mudrika Alamsyah Hasan. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. *Universitas Riau*. Vol. 1 No. 2.
- Fitrawati, Abdul Kahar dan Muh. Iqbal A. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Universitas Tadulako*. *E Jurnal Katalogis*, Vol. 5 No.12, 177-184. ISSN 2302-2019.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- _____. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta
- Moehariono. 2014. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Riduwan dan Sunarto. 2007. *Pengantar Statiska untuk Penelitian: Pendidikan, Sosial, Komunikasi, Ekonomi dan Bisnis*. Alfabeta: Bandung.
- Azizah, A. N., & Widyawati, D. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(2).
- Widaryanti, W., & Pancawardani, N. L. (2020). Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 15(2), 477-492
- Daulay, A. F., Arfan, M., & Basri, H. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Keuangan, Dan Pengawasan Intern Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerahkota Lhokseumawe. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 4(3).
- Karima, D., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36-44.
- Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(3), 825-840.

- Widaryanti, Widaryanti, and Nurul Latifah Pancawardani. "Analisis Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah." *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi* 15, no. 2 (2020): 477–92. <https://doi.org/10.34152/fe.15.2.477-492>.
- Yulianto, Ahmad Rudi, and Osmad Muthaher. "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati." *Tirtayasa Ekonomika* 14, no. 2 (2019): 204. <https://doi.org/10.35448/jte.v14i2.6478>.